

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PANCASILA: TINGKATAN DALAM MEMAHAMI KEJUJURAN

Lili Halimah¹, Arnie Fajar², Yayuk Hidayah³

^{1,2} STKIP Pasundan Cimahi

³ Universitas Ahmad Dahlan

Email : yayuk.hidayah@pgsd.uad.ac.id

Abstrak

Berbagai tindakan korupsi di Indonesia dan negara-negara lain bermunculan pada setiap aspek kehidupan, bahayanya dapat menular kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi perlu diperkenalkan kepada generasi muda pada abad ke-21 dimulai dari Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tinggi. Salah satu implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah adalah diintegrasikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn siswa terkait dengan nilai kejujuran. Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional survai pada siswa sekolah menengah di Kota Cimahi. Partisipan dalam penelitian ini adalah 100 siswa. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman siswa baik terhadap nilai kejujuran. Studi lebih lanjut tentang pendidikan anti-korupsi dalam tema yang lebih luas disarankan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pendidikan anti-korupsi, Pancasila, nilai kejujuran

Abstract

Various acts of corruption in Indonesia and other countries have sprung up in every aspect of life. The danger can be transmitted to the younger generation. Therefore, anti-corruption education should be introduced to the younger generation in the 21st century starting from primary education to higher education. The implementation of anti-corruption education in schools is integrated through the subject Pancasila and Citizenship Education (PPKn). The purpose of this study was to analyze the implementation of anti-corruption education in the subject Pancasila and Citizenship Education (PPKn) related to the value of honesty. The method used was cross sectional survey carried out on secondary school students in Cimahi. The participants were 100 students. The results showed that the high level of students' understanding on the value of honesty was good. Further studies on anti-corruption education in broader themes were suggested in this study.

Keywords: anti-corruption education, Pancasila, values of honesty

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menghambat kemajuan sebuah negara adalah banyaknya praktik korupsi. (Prakstisi, 2015) maka dari itu perlu ada gerakan anti-korupsi, seperti halnya penelitian Cole (2015) dengan menggunakan 119 negara antara tahun 1984 dan 2012 dengan tujuan meneliti efek gerakan anti-korupsi global. Lonjakan global dalam pengorganisasian, pemantauan, dan legalisasi anti-korupsi secara paradoks dikaitkan dengan peningkatan tingkat korupsi di atas sejumlah faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 6 langkah strategi nasional terwujudnya penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional, dan penyelamatan asset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan budaya korupsi, dan mekanis pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi (Rosikah & Listianingsih, 2015).

Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan korupsi. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi (Shobirin, 2015). Pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap antikorupsi. (Sax, 1993) Seperti halnya penelitian Bandaranayake (2014) menganalisis implementasi kebijakan pengendalian penipuan dan korupsi dalam Departemen Pendidikan Victoria dan Pengembangan Anak Usia Dini di Australia menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada solusi mudah untuk mengikuti penipuan dan pengendalian korupsi atau model yang terbukti untuk diikuti, kasus ini menyajikan pelajaran bermanfaat bagi para profesional yang bekerja di sistem pendidikan yang besar dan terdevolusi.

Pendidikan anti-korupsi adalah proses untuk menguatkan sikap anti-korupsi dalam diri peserta didik sedini mungkin. Untuk itu diperlukan aksi guru yang benar-benar berangkat dari keinginan untuk membangun peradaban baru yang lebih baik dan bebas korupsi (Anas et al., 2018). Pendidikan antikorupsi ditinjau dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarakter, akan muncul sebuah pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang khas dan berpenciri (Manurung, 2012). Pendidikan anti korupsi adalah sayatan atau bagian dari pendidikan karakter (Fajar, 2019) Pendidikan Anti-korupsi (PAK) dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, namun tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. PAK dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku siswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim sekolah sangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa. Salah satu implementasi pendidikan anti-korupsi di sekolah adalah terintegrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PAK di sekolah mengajak siswa secara sadar membangun mental bahwa korupsi adalah penyakit yang merugikan diri sendiri, masyarakat serta masa depan bangsa (Darmawan, Kesuma, & Permana, 2008).

PPKn menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Dalam PKn ditanamkan nilai-nilai dan kompetensi baik menyangkut civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions/virtue (CICED, 1998). (Nurul Zuriah, 2011) menyatakan bahwa PKn menjadi instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi guru PPKn tentang korupsi dan antikorupsi memberikan andil yang besar kepada konstruksi siswa, di

Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran

samping pengaruh dari media massa dan elektronik (Harmanto & Danial, 2012). Penanaman nilai-nilai luhur dapat diperkenalkan sejak dini melalui penyisipan 9 nilai-nilai luhur yang membentuk karakter anti korupsi yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, mandiri, sederhana, adil dan peduli dalam beberapa mata pelajaran yang sudah ada. Nilai kejujuran penting untuk diajarkan untuk mengurangi dekadensi moral. Penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti-korupsi pada akhirnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak buruk korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk berperan serta dalam memberantas korupsi. Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi (Eko Handoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, 2010).

Dotty Rahmatiasih dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan, sifat jujur diyakini efektif mencegah perilaku korupsi; Jujur ialah sikap utama yang kami kenalkan kepada anak-anak. Sifat ini mencegah adanya korupsi. Aradila Caesar, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch; membiasakan anak-anak untuk bersikap jujur mencegah mereka melakukan tindak korupsi, tindakan-tindakan kecil seperti mengambil kembalian belanja untuk membeli permen atau berbohong tentang uang sekolah juga harus dicegah dan dihentikan. Jika terus dilakukan, maka bisa saja anak-anak akan terbiasa. Nanti akan diulangi hingga mereka dewasa dan dengan skala yang lebih luas. Pribadi jujur dan antikorupsi ini harus dibangun sedari kecil (Octama, 29019). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi pendidikan anti-korupsi pada mata pelajaran PPKn siswa terkait dengan nilai kejujuran. Kita dapat mengetahui besaran tingkat pemahaman siswa terhadap nilai kejujuran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: seberapa besar tingkat pemahaman siswa terhadap nilai kejujuran.

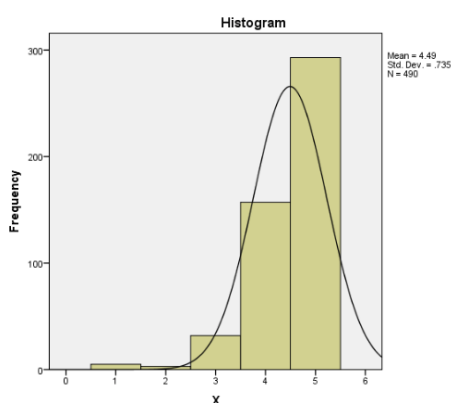
METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di sekolah menengah di Kota Cimahi kelas 7 seluruhnya yang berjumlah 100 siswa. Dalam menentukan jumlah ukuran sampel minimal yang dianggap dapat merepresentatifkan menggunakan tabel sampel Krejcie dan Morgan, jumlah populasi 100 peserta didik berada pada sampel pada tabel berjumlah 80 cukup mewakili populasi (Singarimbun & Effendi, 2008). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Creswell, 2010). Dalam desain ini, peneliti melakukan pencatatan dan penganalisaan

data hasil penelitian menggunakan perhitungan statistik dan metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian cross sectional survey, suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach). (Notoatmodjo., 2002). Penggunaan cross sectional survey dilatarbelakangi hanya mengobservasi fenomena pemahaman nilai kejujuran pada siswa di Kota Cimahi pada satu titik waktu tertentu secara bersamaan pada populasi yang diteliti (Nurdini, 2006)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti memberikan pertanyaan secara online melalui google form terhadap 100 siswa kelas 7 di kota Cimahi. Pertanyaan diberikan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap nilai kejujuran. Berdasarkan hasil survei, di dapat data pada gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1: Pemahaman Siswa tentang Nilai Kejujuran

Data tersebut di peroleh dari kuesioner yang berisi tanda-tanda hasil belajar tentang perilaku jujur yaitu 1) Terbiasa secara konsisten mengamalkan perilaku jujur kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun; 2) Terbiasa secara konsisten menghindari perilaku tidak jujur; 3) Berperan aktif dalam mengajak teman dalam berperilaku jujur disemua kegiatan secara konsisten; 4) Berperan aktif dalam mengajak teman untuk menghindari perilaku tidak jujur di semua kegiatan secara konsisten; 5) Menghasilkan berbagai karya sebagai bukti pengamalan perilaku jujur dalam berbagai kegiatan.

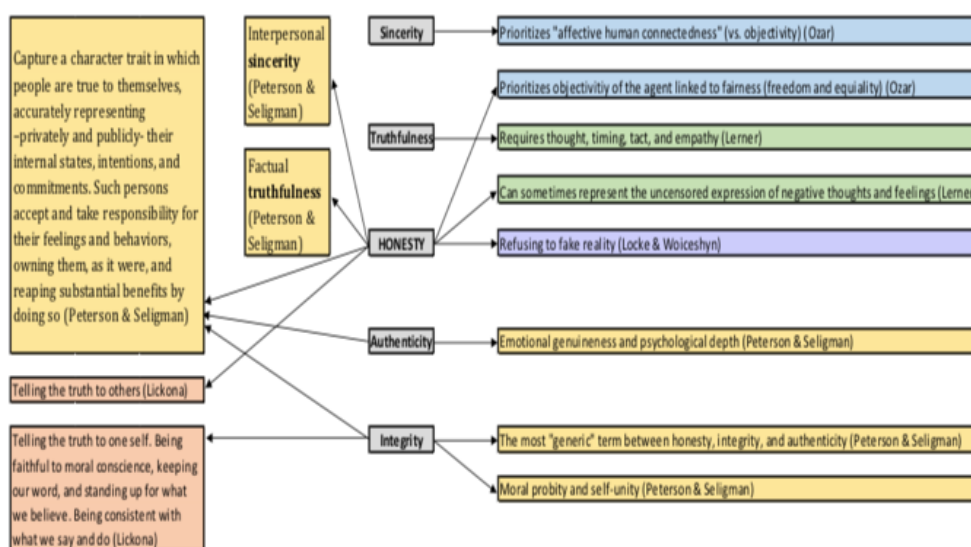
Berdasarkan gambar 1 dapat dipahami bahwa pemahaman siswa terhadap nilai kejujuran adalah baik. Orientasi nilai sosial ditunjukkan untuk memediasi sebagian efek dari perilaku (Handoyo, Subagyo, & Susanti, 2010). Sebagai manusia, pada dasarnya setiap manusia memiliki nilai kejujuran. Numun demikian, sikap jujur memerlukan pelatihan sejak

dini. Hasil penelitian terhadap 167 pasangan menunjukkan bahwa dukungan otonomi dikaitkan dengan identifikasi remaja terhadap nilai kejujuran. Hubungan yang berlawanan diamati dengan mengendalikan pengasuhan anak. Identifikasi nilai kejujuran yang lebih tinggi dan biaya rendah / manfaat tinggi kejujuran pada gilirannya diprediksi kejujuran remaja (Bureau & Mageau, 2014) Pada gambar 1, orientasi sikap jujur siswa di kota cimahi adalah baik. Hal ini mencakup jenis kejujuran yang terbaca dari hasil survai yaitu kehendak, ucapan dan perbuatan. Kejujuran memiliki nilai karena mereka menyiratkan bahwa membuat koreksi yang diperlukan untuk mencapai kinerja masa depan yang lebih kuat (Chance, Cicon, & Ferris, 2015). Pemahaman yang berbeda tentang kejujuran dapat menentukan orientasi sikap seseorang terhadap sudut pandang kejujuran. Memahami bagaimana ciri-ciri dan nilai-nilai kepribadian menggambarkan perilaku orang dalam konteks interpersonal (Balakrishnan, Plouffe, & Saklofske, 2017) Guru harus setiap saat dipandang sebagai lambang kejujuran. Akhirnya, siswa mengajukan potensi positif untuk mempraktekkan kejujuran dengan sebagian besar dari mereka cukup jujur dalam kehidupan pribadi mereka dan dengan interaksi mereka dengan masyarakat saat mereka melakukan tugas di masa depan sebagai profesional (Tamayo, 2014). Selain itu setiap manusia juga memiliki pemahaman yang berbeda tentang kejujuran dan kepercayaan. Hasil penelitian terhadap siswa SD, SMP, SMA di 10 provinsi, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada semua aspek yaitu persepsi, sikap, dan pengetahuan tentang korupsi setelah mereka mendapatkan pembelajaran antikorupsi yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn. Bahkan untuk siswa SMP ditemukan bahwa sikap dan perilaku kejujuran, tanggung jawab, ketertiban, dan kemandirian terlihat ketika mereka sedang melakukan transaksi di kantin kejujuran (Fajar, 2018a). Anak-anak memiliki pemahaman yang berbeda tentang hubungan antara kejujuran dan kepercayaan (Xu et al., 2013). Apa yang membuat mereka terlibat dalam kecurangan, karena guru tidak memberikan hukuman ketika ia dan dia menangkap mereka (Diego, 2017) Hal ini diduga karena siswa masih melihat terjadi kontradiktif antara realita yang terjadi dalam masyarakat dengan yang diajarkan guru. Misalnya menyontek, oleh guru dikategorikan sebagai tindakan korupsi (tidak jujur), namun ketika siswa melakukannya tidak semua guru memberikan sanksi terhadap siswa tersebut (Fajar, 2018b)

Individu yang rendah dalam refleksi diri lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku tidak bermoral meskipun kecil kemungkinannya (Hilbig, Moshagen, & Zettler, 2014). Sikap jujur adalah sikap yang menyesuaikan antara informasi yang diterima dan fenomena yang terjadi. Hubungan positif yang konsisten antara sikap negatif dan kejujuran (Feldman, Lian, Kosinski, & Stillwell, 2017) Kejujuran merupakan perhiasan bagi orang yang berbudi mulia

Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran

dan berilmu, sehingga sifat ini sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat manusia, khususnya umat Islam. Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan, karena jujur sangat identik dengan kebenaran (Amin, 2017). Berikut adalah definisi kejujuran dan istilah terkait dengan kejujuran berdasarkan (Center For Character And Citizenship, n.d.)



Gambar 1: Definisi kejujuran dan istilah terkait

Pendidikan anti-Korupsi di Indonesia

Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Berharap adanya kerjanya dari pejuang keadilan. Sejarah korupsi di Indonesia sepertinya selalu berulang sejak rezim orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Kemiskinan, kelaparan, kehilangan tempat tinggal, tanah dan sumber kehidupan lainnya diderita oleh jutaan orang di negeri ini disebabkan oleh korupsi (Suradi Yasil, 2005). Kejahatan sosial berupa kriminalitas, kejahatan dalam jabatan timbulnya KKN Kollusi, Korupsi dan Nepotisme rentan membuat Indonesia terganggu stabilitasnya (Lopa, 2001). Keberadaan ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi (Shobirin, 2015). Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa indikator sosial dan ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Indonesia tumbuh ditengah gejolak krisis dunia dan mencatatkan diri sebagai wakil dari negara berkembang di percaturan politik negara-negara G20. Patut diakui bahwa pertumbuhan yang

dialami oleh Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan. berbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang sangat parah terjadi di negeri ini. Aksen plan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, untuk memberantas korupsi sampai perlu dibuat Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (ICW, 2005). Siapa pun harus mengakui bahwa proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Lebih dari itu, harus ada kerja-kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Juga harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi.

Transparency International Indonesia mengumumkan capaian *Corruption Perception Index - CPI 2016*, di mana untuk tahun 2016 skor CPI Indonesia naik satu peringkat (dari 36 menjadi 37), namun turun dua peringkat dalam urutan dunia (dari 88 menjadi urutan 90 dunia). Untuk rentang skor 0 terburuk dan skor 100 terbaik, di Asia Pacific Indonesia menduduki peringkat 15, dan peringkat 4 di antara negara-negara anggota ASEAN. Dilihat dari perspektif teori pembangunan manusia, maka keberhasilan pembangunan dinilai melalui setidaknya empat unsur yaitu: peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, dan pemberdayaan manusia. Korupsi sangat merugikan. Sumber daya yang dicuri dari anggaran pendidikan berarti ruang kelas yang terlalu padat dan sekolah yang hancur, atau tidak ada sekolah sama sekali. Buku dan persediaan terkadang dijual alih-alih diberikan secara gratis. Sekolah dan universitas juga 'menjual' tempat sekolah atau membebaskan biaya yang tidak sah, memaksa siswa (biasanya perempuan) untuk keluar. Guru dan dosen ditunjuk melalui koneksi keluarga, tanpa kualifikasi. Nilai dapat dibeli, sementara guru memaksa siswa untuk membayar uang sekolah di luar kelas. Dalam pendidikan tinggi, pengaruh pemerintah dan sektor swasta yang tidak semestinya dapat memengaruhi agenda penelitian. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan pendorong utama pembangunan manusia dan ekonomi. Itu memperkuat integritas pribadi dan membentuk masyarakat di mana kita hidup. Karena pendidikan biasanya terdiri dari 20-30 persen dari anggaran suatu negara, ia sangat rentan terhadap korupsi, dari kementerian pendidikan nasional hingga sekolah dan universitas setempat (International, 2018).

Berbagai penelitian menunjukkan banyak penyimpangan dalam pencapaian empat ukuran keberhasilan pembangunan tersebut, dan salah satu sarana koreksinya adalah pemberantasan korupsi (Hardjapamekas, 2017). Muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilia-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. di

Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran

masa depan sebagai professional, siswa adalah calon pemimpin masa depan (*student are today, leaders are tomorrow*), yang diharapkan mampu membangun sistem nilai antikorupsi (Fajar, Arnie, 2017). Korupsi berkontribusi pada hasil pendidikan yang buruk. Pengalihan dana sekolah merampas sumber daya sekolah, sementara nepotisme dan favoritisme dapat menempatkan guru yang tidak berkualitas di kelas. Bid-rigging dapat menghasilkan buku pelajaran dan persediaan dengan kualitas lebih rendah. Ketika keluarga harus membayar suap untuk layanan, ini membuat siswa miskin kurang beruntung dan mengurangi akses yang sama ke pendidikan (Monica & Kirya, n.d.). Nilai-nilai moral itu penting untuk diajarkan untuk dikurangi dekadensi moral.

Terdapat berbagai upaya KPK untuk melibatkan partisipasi public didalam upaya pemberantasan korupsi, Berbagai program dibuat (Widjojanto, 2016). Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan nilai moral kepada siswa. Pendidikan adalah cara (Sari, n.d.). Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap antikorupsi. Melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, generasi baru Indonesia diharapkan memiliki pandangan ke depan. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan karakter penting untuk mengatasi perilaku korupsi sejak usia dini, membentuk pikiran siswa terhadap bahaya korupsi, menghasilkan siswa yang sangat baik dengan moral dan perilaku yang baik, dan memengaruhi persepsi guru terhadap korupsi.



Rekomendasi ditawarkan untuk perbaikan pendidikan Indonesia (Sofwan, Setiono, Mohamed Elsayed, & Saudagar, 2018)

Upaya-upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pembangunan perilaku dan budaya anti-korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelenggarakan Program Kampanye Anti-korupsi yang merupakan serangkaian kegiatan penyadaran publik dan peningkatan partisipasi publik yang mendorong bentuk berupa aksi kolektif dan berkolaborasi. Budaya itu dianut dan diyakini bersama, diwariskan dan dipelajari. Proses mempelajari budaya (enkulturasi) dilakukan melalui semua aspek kehidupan keseharian manusia dalam satu komunitas

Pendidikan merupakan salah satu proses pembentukan budaya. Terdapat 4 Prinsip Pendidikan Antikorupsi yang mengarah pada penguatan dan pembangunan Karakter (A.

Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran



Supriyatna et al., 2017). Hal ini diduga karena siswa masih melihat terjadi kontradiktif antara realita yang terjadi dalam masyarakat dengan yang diajarkan guru. Misalnya menyontek, oleh guru dikategorikan sebagai tindakan korupsi (tidak jujur), namun ketika siswa melakukannya tidak semua guru memberikan sanksi terhadap siswa tersebut (Fajar, 2018a). Sebagai bagian dari Pendidikan karakter, pendidikan anti-korupsi

bersifat jangka panjang. Dimulai sejak peserta didik masuk ke satuan pendidikan dasar hingga di pendidikan tinggi. Proses awal memerlukan identifikasi dan perencanaan yang matang, sementara hasilnya baru akan terlihat dalam beberapa dekade.

1. Sebagaimana pendidikan karakter, pendidikan anti-korupsi dipengaruhi oleh perbedaan setiap tahap perkembangan anak. Efektivitas pendidikan karakter harus menimbang dengan seksama karakteristik perkembangan yang dominan pada setiap tahapan usia (Piaget, 1896-1980) (Akhmad Supriyatna et al., 2017).
2. Pendidikan anti-korupsi harus bertumbuh memadukan antara pemahaman, kesadaran dan pengamalan di semua segi kehidupan secara konsisten. Proses ini berlangsung keluarga, sekolah, dan lingkungan atau masyarakat, serta komunitas-komunitas yang dekat dengan kehidupan anak, baik pada tataran sosial maupun budaya. Ki Hajar Dewantara menyebut terdapat tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan, yakni apa yang ia sebut sebagai alam-keluarga, alam perguruan, dan alam-pergerakan pemuda. Secara lebih luas, alam-perguruan /sekolah meliputi di kelas dan di luar kelas, sedangkan alam-pergerakan pemuda meliputi teman bermain dan masyarakat
3. Pendidikan antikorupsi merupakan bagian integral dari Pendidikan karakter generasi muda. Hal ini sangat bergantung pada 2 (dua) faktor besar. *Pertama*, motivasi individu. Artinya, meskipun pendidikan karakter antikorupsi berjalan baik, tetapi selama motivasi individu untuk korupsi tidak berkurang, maka efektivitas sosialisasi nilai-nilai antikorupsi masih dipertanyakan. *Kedua*, pada aras makro, kesempatan untuk melakukan korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat mengikis habis penanaman nilai-nilai baik anti korupsi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para guru Studi Sosiologi di Surabaya menyadari bahwa bahan ajar tentang Pendidikan Anti-Korupsi sangat penting dalam kegiatan pembelajaran IPS. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah untuk memeriksa bahan ajar anti pendidikan yang mengandung nilai karakter anti korupsi. Dengan anti korupsi pendidikan diharapkan dapat memberikan kesadaran dan perubahan

Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran

kepada semua generasi muda untuk memahami dan menyadari pentingnya memiliki karakter anti korupsi dan dapat mengglemlelem dalam masyarakat (Sarmini, Made Swanda, & Nadiroh, 2018).

Nilai Kejujuran Sebagai Nilai Karakter Anti-Korupsi

Nilai Kejujuran sebagai nilai karakter anti-korupsi, hal ini dikarenakan kejujuran adalah bagian dari kepercayaan. Lebih lanjut, hubungan antara penilaian ketidakjujuran dan kepercayaan dimediasi oleh penilaian kebaikan hati anak-anak (Xu et al., 2013). Salah satu hal yang menyatukan kita dalam kehidupan berbangsa adalah adanya nilai-nilai utama yang menjadi landasan kepribadian bangsa. Perbedaan individu dalam moralitas dan kejujuran secara inheren terhubung sedemikian rupa sehingga individu yang lebih cenderung terlibat dalam perilaku tidak bermoral biasanya cenderung mengakui hal itu (Hilbig et al., 2014). Sebagai kepribadian bangsa, nilai-nilai luhur bangsa disepakati, dipahami, kemudian meresap menjadi acuan dalam kehidupan bangsa dan menjadi pedoman dalam segala aktivitas penyelenggaraan negara. Sepanjang sejarah, prinsip-prinsip seperti kepatuhan, kesetiaan, dan kemurnian telah berperan dalam mengikat orang bersama dan membantu mereka berkembang sebagai kelompok, suku, dan bangsa (Smith, Aquino, Koleva, & Graham, 2014). Dari berbagai kajian dan sudut pandang, kita memiliki banyak sekali nilai-nilai karakter. Kemendikbud melansir 18 Nilai Pendidikan Karakter yang dikembangkan di sekolah yang diperoleh melalui kajian empiris yang bersumber dari Agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Nilai ini kemudian dikerucutkan lagi menjadi lima nilai: Integritas, Religius, Nasionalis, Mandiri dan Gotong Royong. Urgensi 18 Nilai Pendidikan Karakter yang dikembangkan di sekolah didukung oleh data hasil penelitian yang menyebutkan bahwa penyebab kegaduhan sosial adalah meleburnya nilai-nilai sosial (Pulfrey & Butera, 2013)

Namun KPK telah menetapkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bermuara pada perilaku anti-korupsi yakni nilai Kejujuran, Tanggung jawab, Kesederhanaan, Kepedulian, Kemandirian, Disiplin, Keadilan, Kerja keras, dan Keberanian Jujur adalah berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan 1) Manfaat Pribadi: Jiwa tenang, damai, bahagia, percaya diri; Selamat dari fitnah; Bernilai ibadah. 2) Manfaat Sosial: Dipercaya, dihargai, dihormati Orang lain merasa nyaman *Memiliki kasih sayang, empati dan keberpihakan kepada sesama maupun lingkungan* Manfaat Pribadi Kepuasan batin, disayang, dihargai, dihormati dan disegani Bernilai ibadah. 3) Manfaat Sosial: Kerukunan, saling menyayangi, saling menghormati, dan timbulnya rasa aman dan nyaman *Memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain.*

Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi masyarakat di wilayah Desa Jabunganan khususnya di kalangan remaja, karena mereka adalah agen perubahan untuk pembangunan bangsa Indonesia dalam rangka membentuk generasi yang memiliki integritas (Pritaningtias, Barendriyas, Sabela, & Utari, 2019)

Agar sifat anti-korupsi tertanam pada anak, permasalahannya adalah bagaimana mengajarkan anak tentang kejujuran anak. Hasil studi menyatakan bahwa kolektivisme mempromosikan penyuaapan melalui tanggung jawab yang lebih rendah untuk tindakan seseorang (Mazar & Aggarwal, 2011). Betapa pentingnya mengatakan hal yang sebenarnya sekalipun sedang berada dalam masa sulit, gaya hidup jujur menciptakan suasana terbuka dimana tidak ada rahasia apa pun, dan beri konsekuensi jika anak tidak jujur berupa hukuman yang sesuai dengan karakteristik anak (Octama, 29019). Perlahan namun pasti, Kejujuran yang selama masa sekolah dijunjung tinggi, ternyata hilang karena. Penelitian lintas disiplin menunjukkan bahwa yang buruk lebih kuat dari yang baik dan bahwa individu menghukum penipuan lebih dari mereka menghargai kejujuran (Wang, Galinsky, & Murnighan, 2009) Melalui pendidikan, karakter anti korupsi akan tercipta seperti menumbuhkan kejujuran, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, kemandirian, kesederhanaan, keadilan dan nilai toleransi (Komalasari & Saripudin, 2015) Strategi anti-korupsi dalam pendidikan dapat menggunakan (a) alat-alat yang mempromosikan transparansi, seperti TIK, penganggaran partisipatif, Survei Pelacakan Pengeluaran Publik, dan audit sosial, dan (b) alat-alat yang mempromosikan akuntabilitas, seperti kontrak berbasis kinerja, kode etik guru, pemantauan masyarakat, mekanisme pengaduan, reformasi gaji, reformasi pengadaan, dan reformasi manajemen keuangan publik (Monica & Kirya, n.d.).

SIMPULAN

Berdasarkan diskusi, penelitian ini dapat memperoleh ide bahwa penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sekolah diintegrasikan melalui mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Kedua hasil menunjukkan tingkat pemahaman siswa yang tinggi tentang nilai kejujuran yang baik. Nilai kejujuran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas 7 di Cimahi dapat diidentifikasi melalui kehidupan sehari-hari siswa dengan menerapkan perilaku jujur dalam pembelajaran mereka. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kejujuran akan mempengaruhi perilaku / sikap siswa. Namun, keberadaan pendidikan anti korupsi melalui Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas 7 di Cimahi juga harus memperhatikan sosialisasi etis anti korupsi, yaitu religiositas, integritas, dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2017). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan. *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 105–124.
- Anas, Z., Supriyatna, A., Kembara, M. D., Hadiana, D., Warsihna, Murhananto, ... Dirjo. (2018). *INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Melalui Mata Pelajaran PPKn untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Balakrishnan, A., Plouffe, R. A., & Saklofske, D. H. (2017). What do sadists value? Is honesty-humility an intermediary? Replicating and extending findings on the link between values and “dark” personalities. *Personality and Individual Differences*, 109, 142–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.12.055>
- Bandaranayake, B. (2014). Fraud and Corruption Control at Education System Level: A Case Study of the Victorian Department of Education and Early Childhood Development in Australia. *Journal of Cases in Educational Leadership*, 17(4), 34–53. <https://doi.org/10.1177/1555458914549669>
- Bureau, J. S., & Mageau, G. A. (2014). Parental autonomy support and honesty: The mediating role of identification with the honesty value and perceived costs and benefits of honesty. *Journal of Adolescence*, 37(3), 225–236.
- Center For Character And Citizenship. (n.d.). *K-12 Center For Character And Citizenship Honesty Systematic Review*.
- Chance, D., Cicon, J., & Ferris, S. P. (2015). Poor performance and the value of corporate honesty. *Journal of Corporate Finance*, 33, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.04.008>
- CICED. (1998). *Democratic Citizens in A Civic Society: Workshop Report*. Bandung: Center For Indonesia.
- Cole, W. M. (2015). Institutionalizing a global anti-corruption regime: Perverse effects on country outcomes, 1984–2012. *International Journal of Comparative Sociology*, 56(1), 53–80. <https://doi.org/10.1177/0020715215578885>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Darmawan, C., Kesuma, D., & Permana, J. (2008). *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Diego, L. A. B. (2017). Friends with Benefits: Causes and Effects of Learners’ Cheating Practices During Examination. *IAFOR Journal of Education*, 5(2), 121–138.
- Eko Handoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, A. S. (2010). Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Sma 6 Kota Semarang,. *Jurnal Abdimas*, 14(1–7).
- Fajar, Arnie, D. (2017). *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fajar, A. (2018a). Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education. In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) Part of series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Fajar, A. (2018b). Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education. In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) Part of series:*

- Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Jurnal Atlantis Press.*
- Fajar, A. (2019). *Anti-Corruption Education In Social Science Learning Based On Portfolio, Makalah pada Seminar Antar Bangsa (Join Seminar)*. Johor – Malaysia, 18 Maret 2019.
- Feldman, G., Lian, H., Kosinski, M., & Stillwell, D. (2017). Frankly, We Do Give a Damn: The Relationship Between Profanity and Honesty. *Social Psychological and Personality Science*, 8(7), 816–826. <https://doi.org/10.1177/1948550616681055>
- Handoyo, A. S. E., Subagyo, & Susanti, M. H. (2010). Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Sma 6 Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 14, 1–7.
- Hardjapamekas, R. E. (2017). *Tantangan Governansi/Tata Kelola dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik dan Sektor Swasta*. Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Harmanto, & Danial, E. (2012). Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pkn sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Ilmu dan Pembelajaran*, 19(2), 157-171.
- Hilbig, B. E., Moshagen, M., & Zettler, I. (2014). Truth Will Out: Linking Personality, Morality, and Honesty Through Indirect Questioning. *Social Psychological and Personality Science*, 6(2), 140–147. <https://doi.org/10.1177/1948550614553640>
- ICW. (2005). Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *ntikorupsi.org*.
- International, T. (2018). Education, Problem, Sollution. *Transparency International*.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2015). Integration of Anti-Corruption Education in School's Activitie. *American Journal of Applied Sciences*, 12(6), 445–451. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.445.45>
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 232–244.
- Mazar, N., & Aggarwal, P. (2011). Greasing the Palm: Can Collectivism Promote Bribery? *Psychological Science*, 22(7), 843–848. <https://doi.org/10.1177/0956797611412389>
- Monica, & Kirya. (n.d.). No Title.
- Notoatmodjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurdini, A. (2006). Cross-Sectional vs Longitudinal :Pilihan Rancangan waktu dalam Penelitian Perumahan Pemukiman. *Dimensi Teknik Arsitektur* 3, 34(1), 52–58.
- Nurul Zuriah. (2011). *Disertasi: Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal :Studi Di Perguruan Tinggi Kota Malang*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Octama, C. (29019). Mengajarkan Sifat Antikorupsi ke Anak dengan Kejujuran Kejujuran diyakini efektif mencegah korupsi.
- Prakstisi. (2015). PENANGULANGAN KORUPSI NKRI 3015 Masyarakat Prakstisi (community practice). *cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id*.
- Pritaningtias, D. W., Barendriyas, A. S., Sabela, A. R., & Utari, I. S. (2019). Implementation of Anti-Corruption Education Through Penetrasi Method (Penanaman 9 Nilai Karakter Anti Korupsi) for the Urban Village Community of Jabungan. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 45–64. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33752>
- Pulfrey, C., & Butera, F. (2013). Why Neoliberal Values of Self-Enhancement Lead to Cheating in Higher Education: A Motivational Account. *Psychological Science*, 24(11), 2153–2162. <https://doi.org/10.1177/0956797613487221>

- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2015). *Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, N. (n.d.). The Importance Of Teaching Moral Values To The Students. *Journal Of English and Education*, 1(1), 154–162.
- Sarmini, Made Swanda, I., & Nadiroh, U. (2018). The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation. *Journal of Physics: Conference Series*, 953, 12167. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012167>
- Sax, G. (1993). *Principles of educational and psychological measurement and evaluation (3rd ed.)*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Shobirin, M. (2015). Model Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 107–117.
- Singarimbun, & Effendi, M. S. (2008). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Smith, I. H., Aquino, K., Koleva, S., & Graham, J. (2014). The Moral Ties That Bind . . . Even to Out-Groups: The Interactive Effect of Moral Identity and the Binding Moral Foundations. *Psychological Science*, 25(8), 1554–1562. <https://doi.org/10.1177/0956797614534450>
- Sofwan, M., Setiono, P., Mohamed Elsayed, A. E., & Saudagar, F. (2018). Fighting against Corruption through Character Education: The Voices of Indonesian Primary School Teachers. *IRJE (Indonesian Research Journal in Education)*, 2(2), 86–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/irje.v2i2.6092>
- Supriyatna, A., Kembara, D. M., Anas, Z., Tola, B., Hadian, D., & J. Warsihna. (2017). *Pendidikan Antikorupsi. Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MasyarakatKedeputian Bidang Pencegahan,
- Supriyatna, Akhmad, D., M., Anas, K. Z., Tola, B., Hadiana, D., & Jaka, W. (2017). *Pendidikan Antikorupsi. Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Tingkat SMP/MTs Komisi Pemberantasan Korupsi 2017*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Suradi Yasil. (2005). *Republik Korupsi*. Makasar: Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR).
- Tamayo, A. M. (2014). Virtues of Honesty in a Higher Education Institution. *American Journal of Social Sciences*, 2(1), 1-6.
- Wang, C. S., Galinsky, A. D., & Murnighan, J. K. (2009). Bad Drives Psychological Reactions, but Good Propels Behavior: Responses to Honesty and Deception. *Psychological Science*, 20(5), 634–644. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02344.x>
- Widjojanto, B. (2016). *Berkelahi Melawan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing.
- Xu, F., Evans, A. D., Li, C., Li, Q., Heyman, G., & Lee, & K. (2013). The role of honesty and benevolence in children's judgments of trustworthiness. *International Journal of Behavioral Development*, 37(3), 257–265. <https://doi.org/10.1177/0165025413479861>